

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Affrian, R. S. (2023). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. CV. Bintang Semesta Media.
- Amarrohman, F. J., & Witjaksono, O. F. (2021). Buku Ajar Hukum Agraria. Semarang: Undip Press.
- Arisaputra, M. (2015). Reforma Agraria di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba. (2019). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika.
- Darmanah, G. (2019). Metodologi Penelitian. Lampung: CV. HIRA TECH.
- Fajar. Mukti and Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunanegara. (2017). Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana. Jakarta; Tatanusa.
- Hajati, Sri. (2018). Politik Hukum Pertanahan. Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya; Universitas Airlangga Press.
- I., & A., L. A. (2022). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan; Pustaka Prima.
- Ismail, Nurhasan. (2008). Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta; Penerbit buku Kompas.
- Ishaq.H. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press; Mataram.

- Mulyadi. (2015). Implementasi organisasi. yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. Yogyakarta, Gramasurya.
- Napitupulu, Diana R.W. (2022). Materi Pembelajaran Hukum Pertanahan. Jakarta; Universitas Kristen Indonesia.
- Roestamy, Martin. (2015). Hukum Agraria: Pembaharuan Hukum Agraria Dalam Memperoleh Hak Serta Akses Untuk Mendapatkan Manfaat dari Tanah dan Sumber Daya Alam. Jakarta; BPHN.
- Sumardjono, Maria S.W. (2005). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- Salim, M. N. (2020). Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta .
- Sayudi, Yagus. (2023). Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Santoso, Urip. (2017). Hukum Agraria: Kajian Konprehensif. Jakarta; Kencana (Divisi dari Pustaka Media Group).
- Salim, Nazir. (2020). Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. Sleman Yogyakarta; STPN Press.
- Shohibuddin, Mohamad. (2019). Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria. Bogor, Jawa Barat; Baitul Hikmah, Sajogyo Institute, Magnum Pustaka Utama.
- Suratman and Dillah, H. (2015). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Thalib, Hambali. (2011). Sanksi Pemindaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan. Jakarta; Prenada Media Grup.

Widyani, & R.W., N. (2022). Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria. Jakarta; Universitas Kristen Indonesia.

Wijaya, r. (2020). Tanah Indonesia. karawang: gramedia nn.

Widiyanto, Susilo. (2024). Kategori dan Visualisasi Data Pertanahan. Yogyakarta; STPN Press

Artikel Dalam Jurnal

Aisiah, M. d. (2014). Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Reforma Agraria. Jurnal Bhumi, 457-469.

Dewi, G., Nurasih, S., & Tommy, A. (2024). Dampak redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat. Majalah Geografis Indonesia, 38, 16-24.

Alvian Fitra. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jurnal Tugas Agraria, Vol. 5, No. 2.

Anggreani, Dewi. (2023). Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 8.

Adolf, Jozan. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. Jurnal Notarius, Vol. 13. No. 1.

Elih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal at-Tadbir, 30.

- Febrinayanti Dantes. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, 116.
- Guntoro. (2025). Menggagas Reforma Agraria Perkotaan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Good Governance Untuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal. Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol.11, No.1.
- Hapsari Hadi. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9, No. 3.
- Herman Yudiawan. (2021). Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7.
- Mulyaputri, Elsani. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Jurnal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 2.
- Maladi, Yanis. (2014). Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 1.
- Nadila. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis, Vol. 9, No. 1.

- Nurlinda, Ida. (2018). Perolehan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Peraturannya. Vol. 4, No. 2.
- Prasja, T. R., Admiral, & Rosyidi, H. (2018). Efisiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (TORA).
- Putri, Bela Muhdayani. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. Jurnal Hukum dan Permata Sosial Islam, Vol.5.
- Prayoga, Agusti. (2022). Peraturan Kepemilikan Tanah Sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum. Penegakan Hukum Berbasis Transendental.
- Rizqila, Optimizing Audrye Salma. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. Jurnal USM Law Review Vol. 7 No.1.
- Reynaldi. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Lex Crimer, Vol. 6, No. 5.
- Rajab, Rezeki Aldila & Turisno, Bambang Eko & Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. Notarius, Vol. 13, No. 2.
- Rozi, Fathur. (2024). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor BPN Kab. Probolinggo. Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4, No. 1.

- Sumanto, Listyowati. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep dan Implementasi. Jurnal Hukum Nawasena Agraria, Vol. 1, No. 1.
- Sapriadi. (2015). Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Reforma Agraria. Jurnal IUS, Vol III , 364-381.
- Sidik, J. (2021). Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi. Indonesian Perspective, vol. 6, 38-64.
- Syahyuti. (2019). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 2.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. (2022). Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. Vol. 52, No. 1.
- Widodo, Hendro Tri. (2018). Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan. Malang. Setara Press.
- Wowor. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. Lex Privatum, 2.
- Zuman, M. (2018). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 21.

Artikel Elektronik

[https://www.mongabay.co.id/2021/01/11/konflik-agraria-di-bali-utara-tuntutan-](https://www.mongabay.co.id/2021/01/11/konflik-agraria-di-bali-utara-tuntutan-warga-eks-transmigrasi-timtim-bagian-4/amp/)

[warga-eks-transmigrasi-timtim-bagian-4/amp/](https://www.mongabay.co.id/2021/01/11/konflik-agraria-di-bali-utara-tuntutan-warga-eks-transmigrasi-timtim-bagian-4/amp/).

[https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/amp/2164680022/warga-eks-](https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/amp/2164680022/warga-eks-transmigrasi-timtim-perjuangkan-hak-kepemilikan-tanah-berikut-awal-mula-kedatangan-mereka-di-buleleng)

[transmigrasi-timtim-perjuangkan-hak-kepemilikan-tanah-berikut-awal-mula-kedatangan-mereka-di-buleleng](https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/amp/2164680022/warga-eks-transmigrasi-timtim-perjuangkan-hak-kepemilikan-tanah-berikut-awal-mula-kedatangan-mereka-di-buleleng).

Skripsi

Jaya, G. D. (2024). *Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Sumberklampok Dengan Pemerintah Provinsi Bali Melalui Redistribusi Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sandi, G. D. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kantor Pertanahan Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Pertanahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960, (Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2117).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Surat Keputusan Menteri

Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1338/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022